

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan nasional bertujuan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME., berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdasarkan sisi penyelenggaraannya, tujuan pendidikan tertera dalam Pasal 4 UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*, yakni sebagai berikut:

...*Pertama*, Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran; *Kedua*, Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat; *Ketiga*, Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam kongres Taman Siswa pertama Ki Hadjar Dewantara (1977:15) telah menyodorkan konsep pendidikan nasional sebagai berikut:

Pendidikan beralaskan garis hidup dari bangsanya dan ditujukan untuk keperluan perikehidupan yang dapat mengangkat derajat negara dan rakyatnya, agar dapat bekerja bersama-sama dengan lain-lain bangsa untuk kemulyaan segenap manusia di seluruh dunia.

Dari rumusan tersebut di atas dapat kita lihat butir-butir yang dikemukakan Ki Hadjar Dewantara:

Bahwa kebudayaan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan, bahkan

kebudayaan merupakan alas atau dasar pendidikan. Rumusan ini sungguh menjangkau jauh ke depan. Di sini dikatakan bukan hanya pendidikan itu dialaskan kepada suatu aspek intelektual, tetapi kebudayaan sebagai keseluruhan.

Kebudayaan yang menjadi alasan pendidikan tersebut haruslah bersifat kebangsaan. Dengan demikian kebudayaan yang dimaksud adalah kebudayaan yang riil yaitu budaya yang hidup di dalam masyarakat kebangsaan Indonesia. Perlu kita catat di sini bahwa Ki Hadjar Dewantara bukan berbicara mengenai masyarakat Jawa saja, sebab ada anggapan bahwa sistem pendidikan Taman Siswa adalah pendidikan yang eksklusif berdasarkan kebudayaan Jawa. Di sini dimaksudkan adalah masyarakat kebangsaan Indonesia artinya kebudayaan yang dimiliki atau yang akan dibentuk dan dikembangkan oleh masyarakat Indonesia. Apabila kebudayaan kebangsaan Indonesia itu belum terwujud maka merupakan tugas kita termasuk tugas pendidikan nasional untuk ikut mewujudkan kebudayaan kebangsaan yang dimaksud. Di sinilah peranan pendidikan nasional sebagai bagian dari kebudayaan nasional untuk ikut membangun kebudayaan kebangsaan Indonesia.

Pendidikan mempunyai arah yaitu untuk mewujudkan keperluan perikehidupan. Apa yang dimaksud dengan perikehidupan di sini bukannya hanya suatu aspek daripada kehidupan manusia tetapi seluruh kehidupan manusia. Demikian pula yang dimaksud dengan perikehidupan adalah kebutuhan tersebut dirasakan oleh masyarakat pada saat ini. Kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan dari seluruh aspek kehidupan.

Arah tujuan pendidikan ialah untuk mengangkat derajat negara dan rakyat. Di sini kita lihat betapa idealnya pendidikan nasional yang bukan bersifat

individualistis tetapi mempunyai warna kerakyatan dan kesatuan nasional. Pendidikan nasional harus dapat mengangkat derajat atau harkat rakyat banyak dan harkat negara. Dengan demikian pendidikan nasional bukan diarahkan kepada kepentingan pemerintah, atau kepentingan suatu golongan yang kaya saja tetapi untuk kepentingan rakyat yaitu rakyat yang terhormat yang mempunyai derajat kehidupan yang memadai. Dengan sendirinya derajat kehidupan rakyat yang semakin meningkat akan meningkatkan pula derajat keharuman negara. Pendidikan diarahkan untuk menanggulangi kebodohan dan kemiskinan. Dengan demikian pendidikan nasional merupakan pengabdian kepada perubahan kehidupan rakyat. Di dalam pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa salah satu tujuan membentuk negara ialah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan yang visioner. Di sini sungguh sangat mengagumkan betapa rumusan Ki Hadjar Dewantara telah jauh mencakup ke depan. Dewantara adalah seorang futuris. Beliau telah melihat bahwa hak-hak asasi manusia dan kehidupan global abad 21 merupakan suatu yang tidak dapat dielakkan. Pendidikan nasional tidak terlepas dari upaya untuk kerjasama dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini untuk meningkatkan derajat kemanusiaan. Dengan kata lain hak-hak asasi manusia dan tanggung jawab bersama merupakan tugas dari pendidikan nasional.

Dalam proses pendidikan di lingkup persekolahan setidaknya terdapat beberapa unsur yang tidak dapat dipisahkan, yakni siswa, guru, bahan ajar, proses belajar, hasil belajar, sarana dan prasarana belajar serta sistem manajemen sekolah. Ketujuh unsur tersebut sangat dominan dalam peningkatan mutu pendidikan. Adapun standar nasional pendidikan

terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Semua itu bermuara pada hasil belajar atau kompetensi peserta didik sebagai lulusan. Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan perilaku sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati.

Sehubungan dengan hal tersebut NCSS mengembangkan standar pembelajaran kewarganegaraan melalui INTASC (*Interstate New Teacher Assessment and Support Consortium*). Standar ini mengutamakan pembelajaran yang terfokus pada siswa, kebermaknaan integratif, dan didasarkan pada nilai-nilai yang menantang dan aktif. Standar tersebut di antaranya sebagai berikut:

- 1) Pembelajaran dan Perkembangannya: Para guru ilmu sosial harus memiliki pengetahuan, kemampuan dan bakat untuk digunakan di tingkat sekolah yang sesuai guna mendukung perkembangan intelektual, sosial dan personal siswa;
- 2) Perbedaan dalam Gaya Belajar: kemampuan menciptakan pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tingkat sekolah agar selaras dengan pendekatan yang berbeda dari berbagai gaya belajar siswa;
- 3) Berpikir Kritis, Pemecahan Masalah, dan Keahlian Performasi: mampu menggunakan berbagai strategi pengajaran di tingkat sekolah yang sesuai untuk mendukung perkembangan berpikir kritis, pemecahan masalah dan keahlian kinerja siswa;
- 4) Pembelajaran Aktif dan Motivasi: mampu menciptakan lingkungan belajar yang sesuai dengan tingkat sekolah yang mendorong interaksi sosial, dukungan aktif dalam belajar dan motivasi diri;
- 5) Penelitian, Kolaborasi, dan Interaksi Ruang Kelas yang Mendukung: mampu untuk menggunakan teknik-teknik verbal, nonverbal dan media komunikasi di tingkat sekolah yang sesuai menggambarkan penelitian, kolaborasi dan aktivitas interaksi yang sportif di kelas;
- 6) Penilaian: mampu untuk menggunakan strategi penilaian formal dan informal pada tingkatan sekolah yang sesuai

untuk mengevaluasi dan meyakinkan perkembangan intelektual, sosial dan fisik siswa secara terus menerus. (Charles B. Myers. 1994: 53-54)

Dalam penjelasan Pasal 37 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* dijelaskan bahwa pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Karena itu, pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran dalam Kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah 1994. Pendidikan kewarganegaraan mengemban visi memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air dalam kerangka *nation and character building*, yakni sebagai sarana untuk membentuk kepribadian bangsa. Visi pendidikan kewarganegaraan dipandang sangat strategis bagi kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara dalam tata kehidupan negara yang demokratis. Suatu negara yang demokratis harus bersandar pada pengetahuan, keterampilan dan kebijakan dari warga negaranya.

Sejalan dengan visi tersebut, tujuan pendidikan kewarganegaraan pada dasarnya adalah untuk mewujudkan partisipasi warga negara yang penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik dengan berlandaskan pada ketaatan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia. Untuk dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh tanggung jawab dalam urusan-urusan publik, setiap warga negara memerlukan seperangkat ilmu pengetahuan dan keterampilan intelektual serta keterampilan berperan serta. Keterampilan berperan serta dari warga negara ini selanjutnya ditingkatkan melalui

pengembangan watak kewarganegaraan yang dapat meningkatkan kemampuan individu warga negara berperan serta dalam proses politik. Setiap warga negara diharapkan dapat mendukung berfungsinya sistem politik yang sehat. Dengan demikian, pendidikan kewarganegaraan berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu: 1) pengetahuan, 2) keterampilan, dan 3) watak kewarganegaraan.

Sekolah memikul tanggung jawab khusus atas pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan watak kewarganegaraan. Tanggung jawab sekolah ini dilaksanakan melalui perangkat kurikulum formal, yakni sejak kelas-kelas rendah dan berlanjut dalam keseluruhan proses pendidikan. Salah satu komponen penting dari perangkat kurikulum pendidikan di sekolah adalah buku pelajaran yang sering disebut buku teks. Ketersediaan buku teks yang bermutu dan memadai merupakan instrumen untuk menghasilkan keluaran pendidikan yang bermutu pula. Sebagai perangkat pembelajaran kurikuler, buku teks sangat bermakna dalam memacu, memajukan, dan mencerdaskan peserta didik. Pentingnya buku teks sebagai sarana belajar tercermin dalam semboyan-semboyan seperti *buku adalah guru yang tak pernah jemu, buku adalah jendela informasi dunia, dan buku menjadi sarana pokok untuk menyimpan dan menyebarkan khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, dan seni*. Bahkan UNESCO mencanangkan semboyan *book for all*, "buku untuk semua".

Buku merupakan salah satu unsur yang dapat dijadikan sumber

materi pembelajaran. Dalam lingkup sekolah, paling tidak ada dua jenis buku yang dominan dipakai dalam proses belajar mengajar, yaitu 1) buku paket (dari Depdiknas), dan 2) buku teks dari berbagai penerbit.

Dalam konteks ini dapat dikatakan bahwa buku paket adalah buku yang dibuat oleh tim pakar atau diterbitkan oleh pemerintah yang dalam hal ini Departemen Pendidikan Nasional. Adapun buku teks dapat dianggap sebagai padanan dari istilah *textbook* dari bahasa Inggris yang dapat diterjemahkan sebagai buku pelajaran atau buku ajar. Bacon (1935) dalam Wesley (1950:302) menjelaskan bahwa buku teks adalah buku yang dirancang untuk penggunaan di kelas, dengan cermat disusun dan disiapkan oleh para pakar ahli dalam bidang itu dan dilengkapi dengan sarana-sarana pembelajaran yang sesuai dan serasi. Sementara itu, Lange (1940) dalam Wesley (1950:302) menyatakan bahwa buku teks adalah buku standar/buku setiap cabang khusus studi dan dapat terdiri dari dua tipe yaitu buku pokok/utama dan suplemen/tambahan. Menurut Tarigan (1986:13) yang disebut buku teks adalah buku pelajaran pada bidang studi tertentu, yang merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu guna maksud-maksud dan tujuan instruksional. Buku teks dilengkapi dengan sarana-sarana pengajaran yang serasi dan mudah difahami oleh para pemakainya di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi sehingga dapat menunjang suatu program pengajaran. Buku teks biasa digunakan oleh guru dan siswa dengan tujuan untuk mempermudah memahami pokok bahasan yang sudah



digariskan dalam kurikulum.

Selain jenisnya yang beragam, buku-buku sekolah di Indonesia menyimpan berbagai persoalan yang kompleks, mulai prosedur pengadaannya, penilaiannya, pengedarannya ke sekolah, penggunaannya oleh siswa dan guru, dan kontribusinya terhadap hasil belajar siswa. Dari segi pengadaannya, persoalan yang dihadapi adalah bagaimana menyediakan buku-buku pelajaran yang bermutu tinggi dan dalam jumlah yang cukup untuk semua atau sebagian besar siswa sehingga penguasaan siswa terhadap materi pelajaran yang tercermin dalam prestasi belajarnya dapat meningkat. Hal ini sejalan dengan studi yang telah dilakukan (Dedi Supriadi, 1997; Heyneman, Farrel & Sepulveda-Stuarto, 1981; World Bank, 1995) yang menyimpulkan bahwa buku pelajaran merupakan penentu yang signifikan terhadap hasil belajar siswa.

Selain buku-buku paket yang dicetak dan diedarkan oleh pemerintah, beredar pula secara luas buku-buku terbitan swasta yang disebut sebagai buku pelengkap (*supplementary textbooks*). Dalam kenyataannya di sekolah, buku-buku pelengkap menjadi buku pokok yang peranannya malah menggantikan (*menyingkirkan*) peranan buku paket. Persoalan buku pelajaran menjadi semakin kompleks karena di dalamnya terjadi konflik kepentingan antara berbagai *stakeholders* pendidikan, yaitu pemerintah, penerbit swasta, pejabat pendidikan di daerah, perusahaan penyalur buku, toko-toko buku, sekolah, orang tua, dan siswa.

Dari hasil penelitian sebelumnya di USA, buku sekolah, khususnya buku pelajaran, merupakan media instruksional yang dominan peranannya di kelas (Patrick, 1988) dan sebagai sentral dalam suatu sistem pendidikan (Altbach *et al.*, 1991). Karena buku merupakan alat penting untuk menyampaikan materi kurikulum, maka buku sekolah menduduki peranan sentral. Penelitian Supriadi (1997:37) terhadap terhadap 867 SD dan MI di Indonesia, mencatat bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku pelajaran di SD berkorelasi positif dan signifikan dengan hasil belajarnya sebagaimana diukur dengan Nilai Ebtanas Murni (NEM). Lima korelasi yang dihitung menunjukkan hasil yang signifikan, yaitu untuk mata pelajaran PPKn, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan Matematika. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi akses siswa terhadap buku pelajaran, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Oleh sebab itu, setiap usaha untuk meningkatkan akses siswa terhadap buku akan meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini konsisten dengan studi tahun 1976 di Indonesia yang menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan siswa akan buku dan fasilitas sekolah lainnya berkorelasi dengan prestasi belajarnya (World Bank, 1989:44).

Penyediaan buku oleh pemerintah ternyata tidak membuat siswa tidak membeli buku pelajaran. Berdasarkan kajian World Bank (1989:48) Pada sekitar 40% sekolah yang disurvei, sebagian besar siswa menggunakan buku terbitan swasta dalam jumlah yang tinggi, sedangkan pada 60% sekolah lainnya kepemilikan siswa atas buku terbitan swasta



rendah. Namun demikian kecenderungan umum menunjukkan bahwa siswa menggunakan dan membeli buku terbitan swasta.

Di kota, siswa lebih banyak menggunakan buku terbitan swasta yang dibeli atas biaya dari orangtua siswa (Supriadi, 1997:34). Dengan demikian siswa di kota memiliki dua keuntungan sekaligus, yaitu buku-buku paket lebih banyak tersedia, sementara itu mereka pun memiliki akses yang lebih mudah terhadap buku-buku pelajaran terbitan swasta. Mengingat buku merupakan penentu penting mutu pendidikan, maka selain karena banyak faktor penentu mutu pendidikan lainnya, dapat dipahami bila hasil belajar siswa di kota lebih baik daripada siswa di desa. Meskipun demikian, hingga saat ini diakui masyarakat pendidikan bahwa faktor yang sangat dominan dalam peningkatan mutu pendidikan di persekolahan adalah sejauhmana kemampuan guru dalam pengelolaan kelas. Dalam arti lain bahwa ada atau tidak ada buku yang dipegang oleh siswa, seorang guru di dalam kelas harus tetap memberikan pembelajaran yang optimal bagi siswanya.

Proses pembelajaran di persekolahan cenderung banyak bergantung pada buku teks. Di dalam kelas, buku teks tidak saja menjadi bahan rujukan pokok bagi siswa dalam belajar, melainkan juga menjadi acuan utama bagi para guru dalam praktik pembelajaran. Dengan semakin besarnya ketergantungan kepada buku teks, maka tuntutan peningkatan mutu materi maupun penyajiannya juga semakin besar.

Kecenderungan tersebut dapat menimbulkan dampak positif

maupun negatif terhadap proses, produk, dan mutu pendidikan pada umumnya. Ketergantungan yang semakin tinggi terhadap buku teks, memacu para penerbit dan penulis untuk berlomba-lomba memasarkan buku teks ke sekolah-sekolah. Belum lagi Depdiknas yang juga menyediakan buku-buku ajar yang disebarakan ke sekolah-sekolah dalam bentuk buku paket. Pengadaan buku teks dalam konteks ini tidak menghadirkan kesulitan yang berarti. Hal ini mengingat banyaknya buku teks yang beredar di pasaran maupun secara langsung dipasarkan di sekolah-sekolah.

Di satu sisi, banyaknya buku teks yang beredar di pasaran dan dipakai di sekolah-sekolah, memberi kesempatan kepada siswa untuk semakin intensif dan ekstensif dalam kegiatan belajarnya. Hal ini mengingat bahwa siswa tidak hanya mengandalkan pada informasi yang diperoleh secara langsung dari guru, melainkan juga dapat mengandalkan dari sumber informasi buku teks. Di sisi lain, dengan semakin banyaknya buku teks maka persoalan seleksi mutu buku teks menjadi sangat penting. Oleh karena itu, pemakaian buku teks secara serampangan (tanpa seleksi yang memadai) dapat menimbulkan kerugian khususnya bagi kepentingan peserta didik. Dengan semakin banyaknya buku teks yang beredar di lapangan, peranan guru dan siswa semakin penting dalam memilih dan memutuskan buku teks yang akan digunakan sebagai buku ajar yang dapat memberikan hasil optimal proses pembelajaran.

Sementara itu, penyusunan bahan pelajaran belum didasarkan

pada hasil penelitian dan pengalaman negara maju (Siahaan, 1991/1992: 204-205), penyusunan buku pelajaran juga belum memperhatikan tingkat kesesuaian bahan dan bahasa secara baik (Pintamtiyastitin, 1997). Dalam hubungannya dengan pembelajaran di sekolah, studi ini penting dilakukan mengingat dalam kegiatan belajar dan mengajar bahan tertulis, terutama *textbook* tetap memegang peranan penting. Menurut Rusyana (1984:214) buku yang banyak digunakan di sekolah menengah tidak disusun dengan mempertimbangkan hasil studi keterbacaan sebab memang studi demikian di negeri kita baru mulai dilakukan. Sebagai akibatnya, buku pelajaran yang tingkat keterbacaannya rendah, semakin sulit untuk dipahami. Begitu pula pendapat Harjasujana (1997:2) bahwa buku yang baik adalah buku yang mudah dipahami isinya. Buku yang tidak dipahami isinya mustahil digemari pembacanya. Oleh karena itu, masalah keterbacaan buku teks perlu diperhatikan bila sang penulis berkeinginan agar karyanya dibaca orang. Oleh karena itu guru harus memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih untuk menilai atau memilih buku-buku yang terbaik bagi para siswanya karena pada umumnya waktu yang tersedia untuk menguraikan materi secara detail sangatlah terbatas.

Karena keterbatasan waktu dan tenaga dalam proses pembelajaran, guru tidak memungkinkan untuk memberikan materi pelajaran secara utuh dan mendalam. Hal inilah yang dapat menghambat tugas guru sebagai pengajar dan menghambat kualitas hasil belajar siswa. Oleh sebab itu, guru harus berusaha mencari cara agar dapat

menyajikan materi pelajaran kepada peserta didik secara lengkap dan berkesinambungan serta melibatkan peserta didik secara langsung ke dalam kegiatan pembelajaran. Padahal kondisi tersebut penting dilakukan karena merupakan bagian dari tujuan optimalisasi proses pembelajaran. Berdasarkan alasan tersebut, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah dengan mengembangkan cara belajar siswa aktif atau *student active learning*. Hal ini berarti bahwa salah satu usaha meningkatkan kualitas hasil belajar dapat ditempuh melalui penggunaan strategi mengajar yang mampu mengembangkan cara belajar siswa aktif. Sebagai cara untuk melaksanakan kegiatan belajar siswa, dapat dilakukan dengan pendekatan belajar melalui buku teks. Selain kemampuan dasar untuk menyampaikan materi yang harus dimiliki guru, buku teks dan juga dapat menentukan tingkat pemahaman siswa terhadap suatu pokok bahasan.

Dengan siswa memiliki buku teks, guru dapat lebih efektif dalam penyampaian materi pembelajaran. Dengan adanya buku teks, guru hanya menjelaskan inti dari pokok bahasan dan siswa hanya tinggal melanjutkannya dengan cara membaca buku teks tersebut. Namun, dalam kenyataannya, khususnya dalam bidang studi PPKn, buku teks masih belum dihargai sebagaimana mestinya dan belum menjadi sumber belajar yang diprioritaskan. Buku teks menjadi bacaan yang kurang diminati. Bahkan ada anggapan di kalangan para siswa bahwa sebagian buku teks tertentu sulit dipahami karena materinya kurang relevan dengan tujuan

dan makna pembelajaran. Dalam konteks penggunaannya di USA, Banks (1985:224) melihat bahwa kebanyakan dari buku teks dikritik sangat membosankan dalam penyajiannya. Buku-buku tersebut lebih mempertimbangkan aspek pasar daripada nilai-nilai pendidikannya. Meskipun demikian, para guru tetap mempercayai isi buku teks telah diperiksa oleh para ahli. Di samping itu, guru pun percaya bahwa penyajian buku teks yang demikian itu, sudah merupakan tuntutan kurikulum.

Pemahaman siswa tentang suatu bidang ilmu tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya. Demikian pula dengan pemahaman terhadap buku teks. Banyak guru, baik di tingkat pendidikan dasar maupun di tingkat menengah, yang menggunakan buku teks sebagai sumber utama informasi, penuntun untuk pembelajaran di kelas, dan sebagai sumber inspirasi mengembangkan gagasan yang berkaitan dengan aktivitas pembelajaran. Merujuk pada ketentuan dari UNESCO (1970:21), isi buku teks harus memuat tiga hal.

1. *It must contain what is basic to the subject being treated.*
2. *It must contribute to the pupils education.*
3. *It must help pupils to understand the world around them and fit them for practical life.*

Atas dasar kenyataan tersebut di atas dapat dipahami bahwa peran buku teks sangat dominan dalam pembelajaran. Penggunaan buku teks harus dipilih secara kritis. Garvey dan Krug (1977:59), mengemukakan

"For intelligent classroom use a textbook or any reference book should be treated critically. One text should be compared with other text. Statements should be questions. Bias should be identified".

Dari pernyataan Krug dapat disimpulkan bahwa penggunaan buku teks atau buku-buku rujukan lainnya haruslah diperlakukan secara kritis. Suatu teks harus diperbandingkan dengan teks lain. Pernyataan-pernyataan yang terdapat di dalamnya harus dipertanyakan, serta bias-bias yang ada harus diidentifikasi. Sehubungan dengan hal itu, tidak ada satu pun guru yang akan menemukan buku teks yang dapat menuntaskan seluruh tanggung jawab pekerjaannya dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru dituntut untuk dapat memilih buku teks yang sesuai dengan kebutuhannya secara kritis. Hal ini sejalan dengan semangat kurikulum SMA 1994 yang tidak lagi menetapkan buku teks yang harus digunakan guru dalam proses pembelajaran, melainkan memberi kebebasan (dalam rangka profesionalisasi) guru untuk memilih dan menetapkan buku teks yang akan digunakan.

Para guru harus diberi pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mengevaluasi dan mengadaptasi buku-buku teks dan mempersiapkan mereka menggunakan buku-buku teks sebagai sumber untuk mengajar secara kreatif. Harapannya adalah buku teks atau buku pegangan dapat dijadikan sumber untuk mendukung dan memudahkan pembelajaran. Seleksi buku teks memerlukan seperangkat pengetahuan dan kemampuan, khususnya kemampuan untuk menganalisis dan

mengkaji kelayakan sebuah buku teks sebagai buku ajar yang memadai. Oleh karena itu, kemampuan menganalisis dan menilai kelayakan buku teks sebagai bahan ajar harus menjadi salah satu keterampilan profesional guru. Dalam upaya menciptakan kualitas proses pembelajaran dengan buku teks, perlu dikembangkan situasi yang kondusif diatur dan direncanakan oleh guru secara sistematis. Sebagaimana diketahui bahwa tugas guru adalah memberikan materi pembelajaran secara utuh dan bukan hanya berupa bahan ajar yang terdapat dalam buku teks.

Ketika mengembangkan kurikulum nasional (1994), baik pada jenjang pendidikan dasar maupun jenjang pendidikan menengah, penggunaan buku teks di sekolah tidak lagi ditentukan secara baku oleh para pengembang kurikulum, melainkan diberikan kebebasan kepada guru untuk menentukan sumber belajar/buku teks yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sekolah. Akibat dari kondisi tersebut di satu pihak guru dituntut untuk menentukan sendiri kelayakan buku teks yang akan digunakan dan di lain pihak bermunculan berbagai ragam buku teks yang diterbitkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan tiap-tiap jenjang pendidikan, termasuk buku teks untuk mata pelajaran PPKn SMA.

Sebagai buku teks yang dijadikan fokus kajian dalam penelitian ini, buku teks PPKn SMA mengandung konsep kewarganegaraan adalah suatu ajaran yang memuat pola-pola hubungan antara individu dan negara. Hubungan dimaksud adalah hubungan bersifat publik karena menjadi warganegara berarti menjadi anggota dari *political community*.

Komunitas politik memiliki banyak aspek di dalamnya, seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, hak, kewajiban dan lain-lain. Semua aspek ini diatur oleh hukum yang dibuat berdasarkan suatu proses yang berlaku di negara tersebut.

Untuk mendidik warga negara yang baik, sebuah negara memerlukan pendidikan kewarganegaraan (*citizenship education*). Begitu pula untuk mendidik karakter warga negara yang baik tergantung kepada sistem kenegaraan atau kaidah yang berlaku di negara itu. Demikian pula kaitannya dalam melihat buku teks PPKn, buku tersebut penting untuk diperhatikan terutama berkaitan dengan kaidah atau sistem nilai dan norma yang berkembang di negara kita.

Berdasarkan latarbelakang di atas, penulis tertarik untuk mengangkat sebuah tema penelitian ***Analisis Isi Buku Teks PPKn Dan Implikasinya Dalam Pengembangan Bahan Ajar Yang Dapat Memberdayakan Keterampilan Berpikir Siswa Kelas II SMA.***

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas dapat diketengahkan rumusan masalah penelitian sebagai berikut: **Bagaimanakah kondisi aktual isi buku teks PPKn yang dipergunakan di SMA Kota Bandung dan bagaimanakah implikasinya terhadap pengembangan buku teks yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa?**

Selanjutnya, dari masalah pokok tersebut dapat dirinci pertanyaan-pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kualitas materi buku teks PPKn SMA? Apakah sudah memadai dikaji dari berbagai dimensi visi dan misi pendidikan kewarganegaraan? Jika belum, faktor apa yang menjadi penyebabnya?
2. Apakah materi dalam buku teks PPKn memberikan stimulus dan kemudahan pada siswa dalam pembelajaran? Faktor-faktor apa saja yang memudahkan/menyulitkan siswa dan guru untuk memahami isi buku teks tersebut?
3. Mengapa siswa menghadapi masalah pembelajaran melalui buku teks PPKn? Bagaimana tingkat keterbacaan buku teks PPKn SMA?
4. Apakah buku teks PPKn sudah mengandung unsur-unsur mendasar yang dapat menjadi bahan pembelajaran dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa?
5. Bagaimanakah model panduan buku teks PPKn SMA yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa?

C. Definisi Konseptual dan Operasional

Untuk menghindari kesimpangsiuran dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, dikemukakan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. *Analisis*, dimaksudkan sebagai penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb.) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dsb.); atau

penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antarbagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:431).

Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian, selain itu analisis bertujuan untuk menjelaskan fenomena, kejadian, perilaku, atau menerangkan apa yang menjadi latarbelakang fenomena, kejadian atau perilaku itu, baik mengenai seseorang, kelompok orang, maupun masyarakat termasuk sebuah dokumen yang berupa buku teks.

Secara substantif, di dalam analisis terjadi berbagai kegiatan seperti berikut:

1) Membandingkan dan mentes teori atau konsep dengan informasi yang ditemukan. 2) Mencari dan menemukan adanya konsep baru dari data yang dikumpulkan. 3) Mencari penjelasan apakah konsep baru itu berlaku umum, atau baru terjadi bila ada prakondisi tertentu. (Purnawan Junadi, 1995:3).

Yang dimaksud analisis dalam penelitian ini yaitu menganalisis isi buku teks PPKn SMA kelas 2.

2. *Implikasi*, keterlibatan, keterkaitan atau keadaan terlibat. Maka dalam kaitan ini implikasi dikatakan sebagai keterkaitan atau keterlibatan kegiatan menganalisis buku teks PPKn dengan pengembangan bahan ajar yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa. (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001:427). Kemudian istilah implikasi dapat dilihat sebagai:

- Istilah implikasi melaporkan tentang kemungkinan konsekuensi hasil temuan penelitian/kebijakan apabila diterapkan di lapangan. Apa yang perlu dilakukan agar hasil tersebut dapat memberikan konsekuensi yang maksimal dalam penggunaan dan mengeliminasi risiko negatifnya (Sukardi, 2003:101-102).

Dengan demikian penulis memakai istilah implikasi ini sebagai keterlibatan atau keterkaitan dari analisis buku teks terhadap pengembangan bahan ajar yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa.

3. *Bahan ajar*, penyusunan bahan pembelajaran pada dasarnya terdiri dari *expanding environment*, *expanding community*, dan *expanding thematical*. Pendekatannya berdasarkan pada keadaan siswa yang terdiri dari beberapa kemampuan dan kematangan untuk mengetahui konsep-konsep secara meluas dan bermakna, baik bagi dirinya maupun bagi lingkungan masyarakatnya.

Materi mengandung maksud, pertama, proses di dalam disiplin ilmu atau keterampilan berpikir kritis, kedua, apa yang diharapkan untuk dipelajari oleh siswa seperti konsep, gagasan, generalisasi dari bagian *subject area* (Klein, 1989:26).

Sedangkan pandangan berikutnya, ditegaskan oleh Taba (1962:291-292).

Content merupakan yang harus diajarkan kepada siswa dan bagaimana materi pelajaran diorganisasikan dalam *subject area*. Dalam hal ini, kajian terhadap materi pelajaran dihadapkan pada masalah *scope* dan *sequence*. *Scope* atau ruang lingkup isi kurikulum dimaksudkan untuk menyatakan keluasan dan kedalaman bahan, sedangkan *sequence* menyangkut urutan isi kurikulum.

Menentukan bahan pelajaran memerlukan beberapa kriteria agar isi disiplin ilmu berupa pengetahuan, nilai-nilai dan keterampilan dapat



tercakup di dalamnya. Begitu pula bahan ajar buku teks PPKn

4. *Memberdayakan*, diambil dari istilah *empowering* atau pemberdayaan dalam konteks ini dikatakan sebagai suatu kegiatan yang mendorong pada pemberdayaan atau peningkatan kompetensi siswa dalam keterampilan berpikir.

Jan Carlzon (Sarah Cook & Steve Macalay, 1996:2) sebagai berikut:

Empowerment, adalah membebaskan seseorang dari kendali yang kaku ... dan memberikan orang tersebut kebebasan untuk bertanggungjawab terhadap ide-idenya, keputusan-keputusannya dan tindakan-tidakannya.

Keterkaitannya dalam konteks pembelajaran, Sarah Cook & Steve

Macalay (1996:2) dalam Sumaatmadja (2002:80) menjelaskan bahwa:

Melalui proses pemberdayaan, peserta didik digiring dan dibimbing menjadi SDM yang memiliki visi, sadar bahwa hidup dan kehidupan itu berpijak di atas realita, dimanapun kita hidup selalu berhadapan dengan orang lain, serta dalam menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, ancaman, hambatan, gangguan, harus menampilkan diri sebagai orang yang berani.

Melalui pemberdayaan diharapkan siswa memiliki kemampuan dalam proses pembelajaran PPKn baik dari dimensi keilmuan maupun nilai, sikap dan kepribadian seperti dimaksud di atas.

5. *Keterampilan Berpikir*, Keterampilan ini meliputi kemampuan mengkonseptualisasi, menafsirkan, menggeneralisasi, menerapkan pengetahuan, dan mengevaluasi pengetahuan. Keterampilan akademik atau belajar: Keterampilan ini meliputi kemampuan menemukan, mengorganisasi, dan mendapatkan informasi melalui bacaan, mendapatkan informasi melalui pendengaran dan pengamatan, mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan,

menafsirkan gambar, bagan, grafik, dan tabel, membuat urutan waktu, membuat catatan, membuat bagan, dan membaca serta menafsirkan peta. Keterampilan kelompok: Keterampilan ini meliputi kemampuan untuk bertindak secara efektif, baik sebagai pemimpin maupun anggota dalam memecahkan masalah kelompok, berpartisipasi dalam proyek penelitian kelompok, membantu menetapkan tujuan kelompok, menggunakan kekuasaan secara efektif dan adil dalam situasi-situasi kelompok, memberikan kontribusi yang bermanfaat kepada proyek kelompok, berkomunikasi secara efektif dalam kelompok, dan membantu memecahkan kontroversi dalam kelompok.

Keterampilan-keterampilan tersebut adalah: 1) Membedakan antara fakta dan nilai dari suatu pendapat; 2) Menentukan reliabilitas sumber; 3) Menentukan akurasi fakta dari suatu pernyataan; 4) Membedakan informasi yang relevan dari yang tidak relevan; 5) Mendeteksi penyimpangan; 6) Mengidentifikasi asumsi yang tidak dinyatakan; 7) Mengidentifikasi tuntutan dan argumen yang tidak jelas atau samar-samar; 8) Mengakui perbuatan yang keliru dan tidak konsisten; 9) Membedakan antara pendapat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan; 10) Menentukan kekuatan argumen. (Beyer, 1985:63).

Yang dimaksudkan keterampilan berpikir dalam pembelajaran PPKn melalui buku teks adalah agar isi materi dalam buku teks dapat melatih siswa dalam pemecahan masalah, berpikir logis, kreatif, kritis dan inovatif.

6. *Model*, dapat diartikan sebagai:

"... a plan or pattern that we can use to design face to face teaching in classrooms or tutorial settings and to shape instructional material-including books, films, tapes, and computer-mediated program and curriculums (long-term courses of study). Each model guides us as we design instruction to help students achieve various objectives" (Joice and Weil, 1994:46).

Model juga dapat dikatakan sebagai "... *A simplified description of a system, use as an aid to understanding the system*". Model yang dimaksud dalam penelitian ini adalah model panduan buku teks PPKn yang diharapkan mampu memberdayakan keterampilan berpikir siswa.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Mendeskripsikan dan menganalisis unsur materi dan pedagogi buku teks PPKn di SMA.
- b. Mengkaji kesesuaian isi buku teks dengan visi dan misi PPKn dalam meningkatkan keterampilan berpikir siswa.
- c. Menguji keterbacaan buku teks PPKn dalam kaitannya dengan kemudahan/kesulitan siswa dalam mempelajari buku tersebut.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat teoretis dan praktis.

Manfaat teoritis yang terutama dapat dikemukakan sebagai berikut.

- a. Penentuan kriteria buku teks PPKn SMA yang baik.
- b. Penyusunan landasan teori dalam penulisan buku teks, khususnya buku teks PPKn.
- c. Pengembangan model konseptual buku teks PPKn yang sesuai

dengan kebutuhan siswa dan berpotensi meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

Adapun manfaat praktis yang diharapkan dalam penelitian ini sebagai berikut.

- a. Membantu guru menentukan bacaan yang sesuai untuk siswa.
- b. Membantu siswa untuk lebih mudah memahami buku teks PPKn dalam meningkatkan keterampilan berpikir.
- c. Meningkatkan mutu pembelajaran PPKn di SMA.
- d. Memberikan masukan bagi penulis buku teks PPKn agar karyanya itu sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan.
- e. Memberi masukan kepada pemegang kebijakan dalam menentukan buku teks PPKn yang berkualitas baik.
- f. Mengembangkan model panduan buku teks yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa.

E. Kerangka Pemikiran

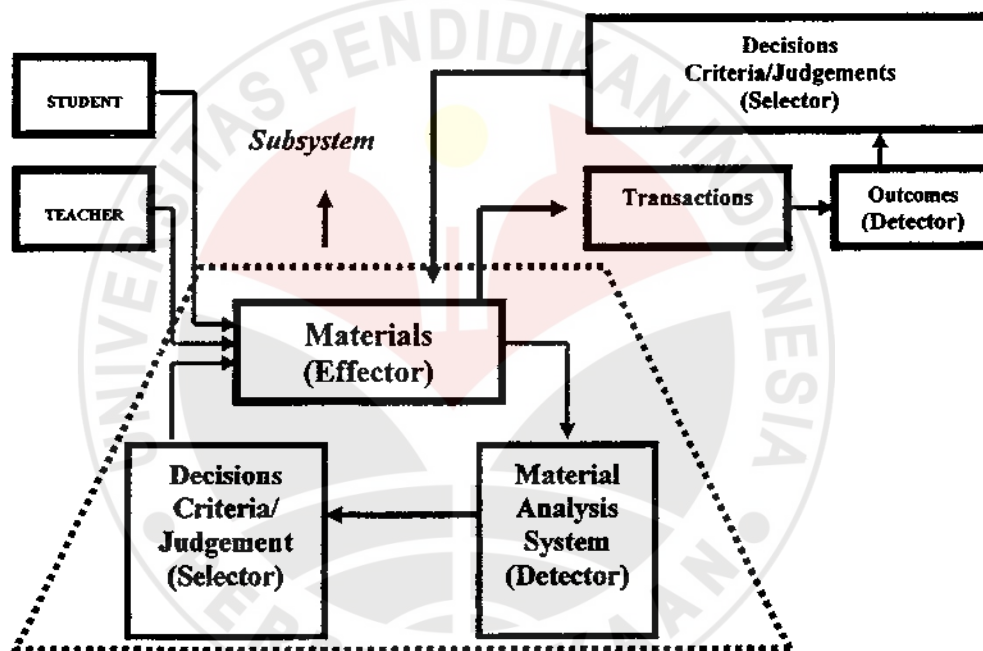
Berikut ini indikator yang akan dijadikan landasan teori dalam mengkaji buku teks PPKn yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

1. Pendekatan Analisis Sistem

Untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan *Curriculum Materials Analysis System* (CMAS) dari Irving Morrisett (1969:243). Dengan model

Cybernetics, peneliti memusatkan penelitian pada buku teks pelajaran PPKn. Keberadaan buku teks sangat mendukung guru dan siswa dalam proses pembelajaran sehingga sangat membantu mendapatkan hasil belajar yang optimal. Skematika dari model *Cybernetics*, dijelaskan di bawah ini.

Gambar 1.1
Cybernetic Model with Material Analysis Subsystem



Modifikasi (Irving Morrissett 1969:244)

Keterangan:

Student	: Siswa
Teacher	: Guru
Material	: Buku Teks PPKn SMA Kelas 2
Transactions	: Proses Pembelajaran
Outcomes	: Hasil Pembelajaran
Decisions Criteria/Judgements	: Kriteria Buku Teks
Material Analysis System	: Sistem Analisis Materi Buku Teks PPKn SMA

Yang dimaksud dengan effector ialah segala sesuatu yang mempengaruhi seperti guru/staf pengajar, kurikulum, textbooks, sedangkan detector adalah hasil belajar peserta didik. Hasil belajar peserta didik ini dikaji oleh selector, kemudian hasil kajiannya dikirim ke effector untuk penyempurnaan. Process CMAS dengan mekanisme Cybernetics ini hendaknya berjalan tetap dan rutin agar setiap penyempurnaan mutu guru/staf pengajar, buku text, dan kurikulum bisa dipertanggungjawabkan. (Numan Somantri, 1995:13).

Seperti yang tampak pada bagan di atas, peneliti berupaya melihat persepsi dari guru dan siswa tentang eksistensi buku teks PPKn sebagai *materials* dalam mendukung proses pembelajaran. Dengan mengetahui pandangan dari pihak guru dan siswa tersebut, penelitian akan diarahkan ke dalam pembentukan kriteria evaluasi terhadap buku teks PPKn.

Dalam penelaahan buku teks PPKn SMA, model yang dapat dijadikan landasan dalam pengembangan penelitian adalah *cybernetic model* (model sibernetik), yakni salah satu subsistem dalam pendekatan dalam menganalisis materi kurikulum. Subsistem memerlukan sebuah metode untuk mengkaji langsung aspek-aspek materi dan kriteria evaluasi yang relevan.

Subsistem analisis materi buku teks sebagaimana bagan tersebut di atas menunjukkan bahwa materi dapat dianalisis; kemudian hasilnya dapat diperbandingkan dengan kriteria evaluasi buku teks sehingga dapat menghasilkan keputusan apakah menolak, menerima, atau memodifikasi materi buku teks PPKn SMA.

2. Pendekatan Pengorganisasiaan Materi

Buku teks adalah buku pelajaran dalam bidang studi tertentu merupakan buku standar yang disusun oleh para pakar dalam bidang itu untuk maksud-maksud dan tujuan pembelajaran yang diperlengkapi dengan sarana dan mudah dipahami oleh para pemakainya, di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi dalam menunjang sesuatu program pembelajaran.

Dengan adanya buku teks dimaksud maka akan mempermudah bagi siswa dan guru dalam memahami bahan ajar, artinya berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan berpikir siswa di sekolah. Garvey dan Krug (1977:59) mengemukakan beberapa jenis keterampilan yang terkait dengan memperoleh informasi dari buku teks sebagai berikut: keterampilan merujuk (*reference skill*), keterampilan pemahaman (*comprehension skill*), keterampilan menganalisis dan mengkritisi (*analytical and critical skill*), keterampilan mengembangkan imajinasi (*imaginative skill*), keterampilan membuat catatan (*note-making skill*).

Kelima keterampilan di atas merupakan manfaat dari eksistensi digunakannya buku teks dalam proses pembelajaran. Dalam penelitian ini peneliti berupaya untuk menganalisis buku teks PPKn SMA dan implikasinya terhadap pengembangan bahan ajar yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

Organisasi materi erat kaitannya dengan kegiatan proses pembelajaran. Keterampilan dan kemampuan guru dalam kegiatan proses

pembelajaran harus berdasarkan pada pengorganisasian materi. Dalam kaitan ini, materi mengandung maksud sebagai berikut: 1) proses di dalam disiplin ilmu atau keterampilan berpikir kritis, 2) sesuatu yang harus dipelajari oleh siswa seperti konsep, gagasan, generalisasi dari bagian *subject area* (Klein, 1989:26).

Menentukan *scope* bahan pelajaran memerlukan beberapa kriteria. Menurut S.M. Nasution (1982:233-235), kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut: Bahan pelajaran harus dipilih berdasarkan tujuan yang hendak dicapai; Bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga sebagai warisan generasi yang lampau; Bahan pelajaran karena berguna untuk menguasai suatu disiplin ilmu; Bahan pelajaran dipilih karena dianggap berharga bagi manusia.

Menurut Achmad Sanusi (1990:24) pengorganisasian materi pelajaran harus benar-benar memenuhi *scientific nature, up to date*. Guru dituntut untuk tampil dengan segala kebolehannya dalam rangka memenuhi *scientific nature*, memiliki semangat serba ingin tahu, memiliki kebebasan dan kemandirian, berpikir sistematis, berpikir faktual, analitis, dan kreatif.

Dalam pengorganisasian materi PPKn menghadapi suatu tantangan baru dalam upaya menerapkan konsep, nilai, dan cita-cita demokrasi yang sudah berkembang bukan saja sebagai sistem kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, tetapi juga sebagai gerakan sosial kesejagatan dalam pergaulan antar bangsa. Oleh karena itu, nilai-nilai

Pancasila dalam PPKn yang akan datang, tidak lagi merupakan satu-satunya perangkat materi ajar dasar PPKn. Materi ajar dasar lainnya yang penting untuk disajikan dalam PPKn adalah nilai-nilai demokrasi yang dipusatkan pada 10 (sepuluh) pilar demokrasi konstitusional sesuai dengan UUD 1945. Kesepuluh pilar tersebut adalah demokrasi yang ber-Ketuhanan yang Maha Esa, demokrasi yang menjunjung hak-hak asasi manusia, demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat, demokrasi yang didukung oleh kecerdasan warga negara, demokrasi yang menerapkan pembagian kekuasaan negara, demokrasi yang menjamin berkembangnya otonomi daerah, demokrasi yang menerapkan konsep negara hukum, demokrasi yang menjamin terselenggaranya peradilan yang merdeka dan tidak memihak, demokrasi yang menumbuhkan kesejahteraan rakyat, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.

Demikian juga melalui PPKn dapat dikembangkan berbagai kemampuan dasar warga negara seperti berpikir kritis, mengambil keputusan, memegang teguh aturan yang adil, menghormati hak orang lain, menjalankan kewajiban, bertanggungjawab atas ucapan dan perbuatannya, beriman dan bertaqwa sesuai dengan agamanya, memiliki komitmen yang tinggi terhadap keputusan bersama, mengemukakan pikiran secara lisan dan tertulis, berargumentasi, memimpin orang lain, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Dengan demikian pendekatan di dalam pengorganisasian bahan ajar sebagaimana dimaksud di atas merupakan salah satu alat analisis

dalam menganalisis buku teks PPKn yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa.

3. Pendekatan Pembelajaran

Pada era reformasi ini bangsa Indonesia sedang berjuang menuju ke masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia yang lebih berbudaya, lebih demokratis, lebih berkeadilan, dan lebih menghormati hak-hak asasi manusia dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Hal itu memberikan implikasi bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah semata-mata diajarkan sebagai tuntunan perilaku antar individu, tetapi juga ditekankan sebagai tuntunan perilaku antar individu sebagai warganegara dan negara. Oleh karena itu, pembelajaran PPKn perlu lebih diarahkan terhadap upaya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, melalui proses pengkajian dan praktek dalam kehidupan sehari-hari dengan cerdas, baik secara rasional maupun emosional.

Untuk dapat mewujudkan kelas PPKn sebagai wahana untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi (laboratorium kehidupan berdemokrasi). PPKn perlu segera teratur menggunakan berbagai strategi pembelajaran interaktif seperti diskusi masalah-masalah aktual, sosial dan membahas suatu masalah dari berbagai sudut pandang. Kegiatan memecahkan masalah secara kelompok, simulasi kegiatan tertentu, aksi

sosial untuk membantu menangani masalah dalam masyarakat, pemecahan masalah praktis atau teoritis, karyawisata ke lembaga-lembaga sosial politik, melakukan dialog dengan masyarakat (*public hearing*), mengadakan debat argumentatif antar siswa untuk membahas hal-hal baru.

Pembelajaran dalam mata pelajaran Kewarganegaraan merupakan proses dan upaya membelajarkan dengan menggunakan pendekatan belajar kontekstual untuk mengembangkan dan meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan karakter warga negara Indonesia. Pendekatan belajar kontekstual dapat diwujudkan antara lain dengan metode-metode: 1) kooperatif, 2) penemuan, 3) inquiri, 4) interaktif, 5) eksploratif, 6) berpikir kritis, dan 7) pemecahan masalah.

Membahas mengenai eksistensi buku teks dalam pembelajaran PPKn, Savage dan Armstrong (1996:124) menyatakan bahwa ada lima informasi yang dibutuhkan dalam rangka membuat keputusan perencanaan pembelajaran, yaitu: 1) informasi tentang peserta didik, 2) hasil belajar yang diharapkan dari peserta didik, 3) sifat dasar materi, 4) pengetahuan tentang metode-metode mengajar, dan 5) pengetahuan tentang sumber-sumber pengajaran yang memungkinkan untuk dipakai. Mengenai buku sebagai sumber belajar.

4. Kajian Unsur Keterbacaan

Sehubungan dengan keterbacaan (*readability*), Dale dan Chall (1984:12-13) mendefinisikan sebagai berikut:

The sum total (including interaction) of all those elements within a given piece of printed materials that affects the success which a group of readers have it. The success is the extent to which they understand it, read it at optimum speed and find it interesting.

Keterbacaan itu adalah jumlah seluruh unsur yang ada dalam teks (termasuk di dalamnya interaksi) yang berpengaruh terhadap keberhasilan yang dicapai oleh kelompok pembaca. Keberhasilan di sini meliputi keluasan materi yang dapat dipahami, membaca dengan kecepatan optimal, dan merasa tertarik dengan teks tersebut.

Definisi Dale and Chall ini sejalan dengan definisi yang dikemukakan McLaughlin (Gilliland, 1976:14). Menurut McLaughlin keterbacaan adalah *"the degree to which a given class of people find certain reading matter compelling and, necessarily, comprehensible"*. McLaughlin menekankan keterbacaan pada karakteristik pembaca dan kemenarikan teks. Artinya, keterbacaan harus didasarkan pada karakteristik pembaca berdasarkan asumsi bahwa pembaca akan melanjutkan membaca hanya bila ia paham dan tertarik tentang hal yang dibacanya.

Gilliland (1976:86) menyimpulkan bahwa ada tiga ide utama yang terkait dengan keterbacaan, yakni a) kemudahan; dan b) kemenarikan; dan c) keterpahaman.

Sakri (1994:165) menyatakan bahwa keterbacaan adalah derajat kemudahan sebuah tulisan untuk dipahami maksudnya. Tulisan yang tinggi keterbacaannya lebih lebih mudah dipahami daripada yang rendah, dan sebaliknya.

Dalam buku "Panduan Penggunaan Kata, Kalimat, dan Wacana" yang diterbitkan oleh Depdikbud (1985:39-40) disebutkan bahwa wacana disebut mudah apabila ia mempunyai tingkat keterbacaan yang tinggi. Artinya, wacana tersebut dapat dipahami oleh sebagian besar pembaca yang ditujunya. Wacana disebut sukar apabila ia mempunyai tingkat keterbacaan yang rendah. Artinya wacana tersebut hanya dapat dipahami oleh sebagian kecil pembaca yang ditujunya. Menurut Klare (1984:726) meningkatnya derajat keterbacaan suatu teks dapat menambah atau meningkatkan berbagai perilaku pembaca, seperti pemahaman, pembelajaran, kecepatan membaca, efisiensi membaca dan keberterimaan.

A. Slamet Harjasujana (1997:2) memandang pentingnya penumbuhan rasa cinta buku dan gemar membaca pada diri anak. Hal tersebut bisa dicapai apabila buku-buku yang harus dicintai dan dibaca itu memadai jumlahnya dan dipahami pula isinya. Oleh karena itu, masalah keterbacaan karya tulis itu perlu diperhatikan bila sang penulis berkeinginan agar karyanya dibaca orang.

Lebih lanjut Harjasujana, dan Yeti Mulyati, (1996:106) menyatakan bahwa "Keterbacaan mempersoalkan tingkat kesulitan atau tingkat kemudahan suatu bahan bacaan tertentu bagi peringkat pembaca tertentu. Keterbacaan adalah ikhwal terbaca tidaknya suatu bahan bacaan tertentu oleh pembacanya. Jadi keterbacaan adalah hal terpahami-tidaknya suatu wacana tertentu oleh pembaca.

Kajian keterbacaan ini dimaksudkan sebagai salah satu alat analisis terhadap buku teks PPKn SMA dengan tujuan agar guru maupun siswa dapat memiliki keterampilan untuk menganalisis buku teks PPKn yang dapat meningkatkan keterampilan berpikir siswa.

5. Memahami dari Unsur Taksonomik Bloom

Jenis belajar menurut Bloom terdiri dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Masing-masing dirinci menjadi bagian yang lebih kecil lagi yang sekaligus menunjukkan tingkatannya, dari yang paling rendah ke yang paling tinggi.

a. Aspek Kognitif

Aspek kognitif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan pengetahuan. Aspek ini meliputi enam jenjang yaitu: 1) pengetahuan (*knowledge*), 2) pemahaman (*comprehension*), 3) penerapan (*aplication*), 4) analisis (*analysis*), 5) *synthesis*, dan 6) evaluasi (*evaluation*). Dalam konsep mata pelajaran Pendidikan kewarganegaraan, aspek ini analog dengan dimensi pengetahuan kewarganegaraan (*Civic knowledge*).

Aspek kognitif adalah suatu ranah atau kawasan yang merupakan "pintu pertama" untuk memasuki kawasan psikomotorik maupun afektif. Seorang siswa dapat mengembangkan aspek psikomotorik dan afektifnya dengan baik apabila berbekal dengan kemampuan kognitif yang baik pula. Pengembangan kemampuan siswa tidak cukup dan tidak boleh berhenti pada aspek kognitif saja, apalagi dalam mata

pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan.

b. Aspek Afektif

Aspek afektif adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan perasaan, sikap dan penghayatan terhadap nilai-nilai. Aspek ini meliputi lima jenjang, yaitu: 1) penerimaan (*receiving*), 2) partisipasi (*responding*), 3) penghayatan nilai-nilai/penentuan sikap (*valuing*), 4) organisasi (*organization*), dan 5) pembentukan pola hidup (*characterization by a value or value complex*). Dalam konsep pendidikan kewarganegaraan, aspek ini analog dengan dimensi watak/karakter kewarganegaraan (*civic disposition*).

Pengembangan aspek afektif atau dimensi watak/karakter kewarganegaraan merupakan hal yang paling substantif dalam tujuan pembelajaran Kewarganegaraan. Kompetensi siswa yang harus dimiliki pada akhirnya harus mengarah pada terbentuknya watak/karakter kewarganegaraan. Itulah sebabnya, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sering disebut sebagai pendidikan afektif dan pendidikan moral atau watak.

c. Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik adalah aspek psikologis yang berhubungan dengan keterampilan melakukan rangkaian gerak-gerik secara sistematis. Aspek ini meliputi tujuh jenjang, yaitu: 1) persepsi (*perception*), 2) kesiapan (*set*), 3) gerakan terbimbing (*guided response*), 4) gerakan yang terbiasa (*mechanical response*), 5) gerakan yang kompleks (*complex response*), 6) penyesuaian pola gerakan (*adjustment*), dan 7) kreativitas (*creativity*). Dalam konsep

mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, aspek ini analog dengan dimensi keterampilan kewarganegaraan (*civics skills*).

Dalam keterampilan kewarganegaraan dikenal adanya keterampilan intelektual (*intellectual skills*) dan keterampilan berpartisipasi (*participatory skills*). Keterampilan pada jenjang pertama dan kedua kiranya dapat dikategorikan sebagai keterampilan intelektual. Keterampilan pada jenjang ketiga dan seterusnya kiranya dapat dikategorikan pada keterampilan partisipasi. Namun demikian, keterampilan berpartisipasi tersebut tentu sangat ditentukan oleh keterampilan intelektualnya. Terlebih-lebih pada jenjang ketujuh atau jenjang kreativitas, di sini peranan keterampilan intelektual sangat menentukan.

Dalam melakukan analisis terhadap buku teks PPKn SMA ini bahwa aspek kognitif, afektif dan psikomotor tidaklah merupakan bagian yang terpisahkan melainkan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan.

Jika tingkat-tingkat berpikir di atas dikembangkan secara proporsional sesuai dengan tingkat perkembangan siswa, siswa akan mampu bernalar secara rasional dan mencari alternatif secara kreatif dalam menghadapi berbagai persoalan. Buku teks PPKn harus dapat mengembangkan kompetensi tersebut di kalangan siswa.

6. Pendekatan Hierarki Berpikir Ilmuwan Sosial

Mengenai hierarki berpikir yang penulis gunakan dalam menganalisis buku teks PPKn adalah teori dari James A. Banks

(1977:106) sebagai berikut:

- a. Data adalah segala sesuatu kejadian atau rangkaian peristiwa yang sifatnya tertulis.
- b. Fakta adalah satuan peristiwa atau hal tertentu yang merupakan data mentah atau pengamatan ilmuwan sosial.
- c. Konsep adalah istilah atau ungkapan abstrak yang berguna untuk menggolongkan atau mengkategorikan sekelompok hal, ide, atau peristiwa.
- d. Generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan-hubungan dari dua konsep atau lebih. Generalisasi merupakan alat yang berguna bagi seseorang untuk menyatakan hubungan di antara fakta-fakta atau informasi yang diperoleh menurut cara yang sangat tersusun rapi dan sistematis.
- e. Teori adalah suatu bentuk pengetahuan tertinggi dan merupakan tujuan utama dari ilmu pengetahuan. Teori terdiri dari serangkaian dalil-dalil atau generalisasi-generalisasi yang saling terkait dan dapat diuji.

Dalam bagian ini dapat dijelaskan lebih jauh mengenai bagaimana kerangka pemikiran yang dijadikan paradigma dalam penelitian ini.

Dari paradigma di atas dapat ditafsirkan bahwa penelitian ini ingin mengkaji keluasan dan kedalaman tentang pandangan atau penilaian para guru dan siswa terhadap isi buku teks PPKn SMA Kelas 2 yang dipastikan memberikan kontribusi besar terhadap keterampilan berpikir siswa. Tahapannya secara garis besar sebagai berikut:

- a. *Input*; Melihat pandangan guru dan siswa tentang buku teks PPKn SMA yang dipergunakan di sekolah mereka masing-masing. Terdiri dari; *Pertama*, Kesesuaian tujuan PPKn dengan materi dan bahan-bahan latihan, *Kedua*, Faktor-faktor yang menyebabkan kemudahan kesulitan kepada siswa dan guru untuk memahami isi yang terkandung dalam buku PPKn.
- b. Buku teks yang dijadikan obyek penelitian yakni buku teks PPKn SMA kelas 2 dari empat penerbit (PT. Epsilon, Erlangga, Yudhistira dan Grafindo). Kandungan isi buku teks PPKn akan unsur-unsur yang dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan berpikir siswa.
- c. *Proses*; Dimensi kajian adalah dari dimensi taksonomik (kognitif, afektif dan psikomotor) dan dimensi hierarki berpikir ilmuwan sosial (data-fakta-konsep-generalisasi-teori) sedangkan fokus kajiannya ada tiga: *content* atau isi, *pedagogis*/pembelajaran, dan *readability*/keterbacaan.
- d. Peneliti menggunakan pendekatan *Curriculum Materials Analysis System* (CMAS) dari Irving Morrissett (1969:243). Dengan model *Cybernetics*, peneliti memusatkan penelitian ini pada buku teks pelajaran PPKn.

- e. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang dipandukan dengan kuantitatif. Metode ini dipandang tepat seperti yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994:177) dalam bukunya *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*.
- f. *Output*; Diharapkan penelitian ini menghasilkan rambu-rambu buku teks yang mampu meningkatkan keterampilan berpikir siswa SMA kelas 2.
- g. *Outcome*; Model Panduan Buku Teks PPKn SMA: Teori, Aplikasi, dan Evaluasi dalam buku teks PPKn memberikan stimulus dan kemudahan kepada siswa kearah peningkatan keterampilan berpikir yang serasi dengan tujuan pembelajaran PPKn di persekolahan.

F. Asumsi

Adapun asumsi yang melandasi penelitian ini adalah:

1. Buku sekolah khususnya buku pelajaran, merupakan media instruksional yang dominan peranannya di kelas (Patrick, 1988) dan bagian sentral dalam suatu sistem pendidikan (Altbach *et al.*, 1991). Karena buku merupakan alat yang penting untuk menyampaikan materi kurikulum, maka buku sekolah menduduki peranan sentral pada semua tingkat pendidikan (Lockeed & Verspoor, 1990).
2. Bahwa semakin tinggi akses siswa terhadap buku pelajaran, maka semakin tinggi pula hasil belajarnya. Oleh sebab itu, setiap usaha untuk meningkatkan akses siswa terhadap buku akan meningkatkan



hasil belajar siswa. Begitu pula tingkat kepemilikan siswa akan buku berkorelasi dengan prestasi belajarnya (World Bank, 1989; Heyneman, Farrel, & Sepulveda-Stuarto, 1981).

3. Buku teks memiliki peranan yang sangat strategis dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bagi siswa. Buku teks PPKn yang memenuhi syarat-syarat kesesuaian tujuan, uraian materi, dan bahan latihan dapat memberdayakan keterampilan berpikir siswa.
4. Buku teks yang baik adalah buku teks yang dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh siswa dan guru. Tingkat keterbacaan buku teks PPKn SMA sangat berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran dan keterampilan berpikir siswa.
5. Pengetahuan dan keterampilan dalam memilih atau menentukan buku teks sangat penting bagi guru dan siswa sebagai bahan pembelajaran. Proses pemilihan buku teks PPKn yang baik berpengaruh langsung terhadap kualitas pembelajaran dan prestasi belajar.
6. Uraian materi buku teks yang baik dilihat dari sisi pengorganisasian materi mencerminkan hierarki berpikir ilmuwan sosial yang terdiri dari data, fakta, konsep, generalisasi, dan teori yang tersusun dengan baik serta memiliki kadar taksonomi kognitif, afektif, maupun psikomotor yang tinggi.
7. Terdapat tiga komponen dasar pengorganisasian bahan ajar dalam PPKn yaitu civic knowledge, civic skills, dan civic dispositions (Margaret S. Branson, 1998).

G. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang dipandang tepat adalah yang dikemukakan oleh John W. Creswell (1994:177) dalam bukunya *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Dalam buku tersebut, Creswell mengemukakan salah satu di antaranya relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan.

...hal yang menguntungkan bagi para peneliti untuk menggabungkan metode pada pemahaman yang lebih baik tentang suatu konsep yang diuji atau digali. Metode pertama ini disebut pendekatan desain dua-fase yang digunakan peneliti untuk mempertemukan fase kualitatif dan fase kuantitatif suatu penelitian. Keuntungan dari pendekatan ini adalah bahwa kedua paradigma jelas keberadaannya, juga peneliti dapat menjadikan paradigma sebagai asumsi pada setiap fasenya.

Lebih lanjut Bryman dalam Julia Brannen (2002:84) mengemukakan bahwa terdapat beberapa kesimpulan dalam penggabungan metode kualitatif dan kuantitatif. Salah satu di antaranya adalah dengan logika triangulasi, yakni bahwa temuan-temuan dari satu jenis studi dapat dicek pada temuan-temuan yang diperoleh dari jenis studi yang lain. Misalnya, hasil-hasil penelitian kualitatif dapat dicek pada studi kuantitatif. Tujuannya secara umum adalah untuk memperkuat kesahihan temuan-temuan.

Sebagian besar uraian metodologis tampaknya sepakat bahwa sepanjang dua paradigma yang berbeda dianggap ada, perbedaan yang terpenting adalah cara masing-masing memperlakukan data. Menurut teori, jika dalam praktiknya peneliti kuantitatif menyisihkan dan menentukan variabel dan kategori-kategorinya, variabel-variabel tersebut

secara bersama-sama terkait dengan bingkai hipotesis yang seringkali ada, sebelum data dikumpulkan dan kemudian diujikan terhadap data. Sebaliknya peneliti kualitatif mulai dengan mendefinisikan konsep-konsep yang sangat umum. Peneliti kualitatif dianggap melakukan pengamatan melalui lensa-lensa yang lebar, mencari pola-pola hubungan antara konsep-konsep yang sebelumnya tidak ditentukan. Sementara itu, dalam penelitian kuantitatif, dilakukan pengamatan melalui lensa yang sempit pada serangkaian variabel yang ditentukan.

Proses penggabungan pendekatan dan metode disusun menurut beberapa faktor. Yang pertama menyangkut arti penting yang diberikan kepada masing-masing pendekatan dalam keseluruhan penelitian. Yang kedua, menurut urutan waktu, jangka waktu untuk mana kedua metode ditempuh secara simultan. Jelaslah bahwa kontribusi metode kualitatif terhadap perumusan masalah teoritis yang dikaji oleh survei, menuntut survei lapangan secara intensif. Di samping itu, jika tujuan survei lapangan kualitatif untuk memperjelas dan memperluas temuan survei, maka hal itu harus dilakukan setelah survei. Faktor ketiga juga terkait dengan urutan waktu dan menyangkut tahap dan proses penelitian saat kedua metode digunakan atau dihentikan. Faktor keempat yang menentukan pemakaian metode, menyangkut pembagian keterampilan dalam penelitian. Pada praktiknya, seluruh masalah saling terkait.

Bentuk instrumen yang digunakan dalam penelitian berupa angket, tes keterbacaan buku teks PPKn melalui uji rumpang kepada siswa dan

pedoman wawancara untuk guru dan siswa serta format panduan penilaian buku teks PPKn SMA. Adapun subyek penelitian, para siswa dan guru sebagai pengguna buku teks PPKn SMA kelas 2 yang berada di Kota Bandung.

H. Kerangka Isi Disertasi

Keseluruhan penulisan laporan dalam disertasi ini penulis laporkan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan menyajikan latar belakang, perumusan masalah, definisi konseptual dan operasional, tujuan dan manfaat penelitian, asumsi penelitian, metode penelitian dan kerangka isi disertasi.

Bab II disajikan kajian teoritik buku teks PPKn dalam pengembangan bahan ajar yang dapat memberdayakan keterampilan berpikir membahas PPKn dalam Konteks Pendidikan IPS di SMA, landasan filosofis buku teks, dan membahas buku teks sebagai sarana peningkatan keterampilan berpikir.

Bab III mengenai metode penelitian menguraikan; pendekatan dan metode penelitian, prosedur penelitian, teknik pengumpulan data, telaah isi dan keterbacaan buku teks, langkah-langkah analisis data, populasi dan sampel.

Bab IV mengenai temuan hasil penelitian dan pembahasan berisi tentang; deskripsi persepsi guru, siswa, dan peneliti tentang buku teks PPKn SMA, analisis buku teks PPKn SMA dalam meningkatkan keterampilan berpikir dan temuan hasil penelitian.

Bab V mengenai Kesimpulan, Rekomendasi, dan Model Panduan terdiri dari, kesimpulan; kesimpulan umum & kesimpulan khusus; rekomendasi bagi Guru, Siswa, DEPDIKNAS, Penulis, dan Penerbit buku teks; serta model panduan buku teks PPKn SMA.

